

# JSKK

## Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban

Aksi Damai setiap Kamis jam 16.00-17.00 di depan Istana Presiden (Kamis ke XII)

Siaran pers Kamis, 5 April 2007

### Anggota DPR yang terhormat, benarkah anda wakil rakyat?

Lagu Wakil Rakyat yang diciptakan dan dinyayikan Iwan Fals sangat jeli melihat kondisi wakil rakyat kita. “wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat, wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju”

Baru saja kita saksikan drama satu babak penolakan wakil rakyat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Pada tanggal 13 Maret 2007, rapat Bamus DPR menyatakan tidak perlunya membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk peristiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II dan Kerusuhan Mei 1998. Hal ini tentunya akan menghambat pengungkapan peristiwa yang terjadi pada tahun 1998 dan menyeret para pelaku pelanggaran HAM, dan yang pasti melukai hati korban.

Korban pelanggaran HAM di Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia yang hak-haknya telah dirampas dengan tidak berperikemanusiaan. Seharusnya hal yang mudah bagi wakil rakyat untuk memahami kebutuhan dan keinginan korban, korban pelanggaran HAM di Indonesia ingin kasusnya segera selesai, itu saja! Tapi apa yang terjadi justru sebaliknya, wakil rakyat justru menjadi bempes bagi para pelaku pelanggaran HAM. Wakil rakyat tidak mempermudah proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM, wakil rakyat tidak merasa penting untuk berpihak pada korban bahkan wakil rakyat lebih melindungi para pelanggar HAM.

Pemilu sebentar lagi, begitu banyak korban pelanggaran HAM yang selama ini hanya menjadi mesin pencetak suara bagi para wakil rakyatnya. Sebelum pemilu para calon wakil rakyat berusaha merayu rakyatnya tapi begitu pemilu selesai, mereka dengan cepat melupakan siapa yang mendukung mereka menjadi wakil rakyat. Sudah saatnya korban pelanggaran HAM bersikap untuk tidak memilih orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi dan para pelanggar HAM. Korban pelanggaran HAM harus jeli dan cerdas untuk melihat partai politik yang benar-benar punya keinginan mendukung perjuangan korban atau yang hanya pura-pura berpihak pada korban. Korban Pelanggaran HAM di Indonesia harus bersama-sama menyatakan sikap untuk tidak mendukung parpol dan orang-orang yang tidak peduli pada penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Korban pelanggaran HAM harus punya posisi tawar yang tinggi agar berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia segera dapat dituntaskan. Korban bersatu tak bisa dikalahkan, korban bersatu tuk tuntaskan kasus, korban bersatu melawan Impunitas. Stop bohongi korban!